

## Walkot Jakpus: DKI Perlu Kewenangan Khusus Jadi Kawasan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengemukakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diberi kewenangan khusus jika nantinya menjadi kawasan ekonomi dan bisnis setelah tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara.

Dhany mengatakan, untuk mendukung konsep sebagai kawasan ekonomi dan bisnis, penambahan kewenangan perlu dilakukan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Ia mencontohkan penanganan banjir di DKI Jakarta yang berasal dari aliran sungai besar menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Padahal persoalan banjir ini bisa mempengaruhi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Maka seharusnya diberikan kewenangan lebih untuk Jakarta, misalkan, untuk mengurus sungai-sungai besar di DKI Jakarta," katanya.

Menurut Dhany, selama ini persoalan infrastruktur di Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Shingga pemerintah daerah tidak bisa menentukan kebijakan karena dinilai berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Selain memberikan penambahan kewenangan, Dhany juga menilai perlu pembiayaan dengan dana otonomi khusus. Hal itu karena pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah harus diimbangi dengan sumber pendanaannya. "Keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam penataan kewenangan harus ditata ulang, porsinya harus diperlebar. Kalau itu tidak diberikan bagaimana kita bermimpi menjadi kota berskala global," kata dia.

Ia menambahkan, Jakarta akan tetap menjadi Kota Metropolitan meskipun ada kepindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pembangunan di Jakarta pun akan terintegrasi dengan daerah penyangka, seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Bodetabek).

"Pembangunan kota sifatnya akan melebar membentuk karakteristik baru sehingga layanan publik pun juga meluas, bukan hanya pada area lokal saja. Tapi juga melayani pada area regional," kata dia. ● yan

## Sudin Bina Marga akan Revitalisasi Trotoar di Kawasan Kota Tua

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat (Jakbar) melakukan survei dalam rangka pekerjaan revitalisasi beberapa titik trotoar di Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakbar, Selasa (15/2). Pekerjaan revitalisasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menata kawasan wisata Kota Tua.

"Lokasi yang kita survei hari ini adalah Jalan Kemulus dan Jalan Lada Dalam," kata Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Jalan Suku Dinas Bina Marga Jakbar, Sigit Widodo saat dikonfirmasi di lokasi, Selasa (15/2).

Sigit menjelaskan, trotoar di wilayah tersebut perlu dibenahi lantaran kawasan Kota Tua merupakan wilayah transit beragam moda transportasi. "Maka dari itu, fasilitas pejalan kaki di lokasi tersebut perlu dibenahi agar

layak dipakai warga," katanya.

Sigit mengatakan, pengerjaan trotoar di dua titik itu sudah berjalan sejak Desember 2021 lalu. Saat ini, pengerjaan masih berlangsung oleh pengembang. Bahkan, saat ini ada dua ruas trotoar lagi yang akan diperbaiki namun proses pengerjaan masih dalam tahap pelelangan. "Jalan Ketumbar dan Lada Raya belum mulai karena masih proses lelang para pengembang," kata Sigit.

Menurut Sigit, revitalisasi trotoar itu tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2022, melainkan menggunakan Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L). Sigit memperkirakan proyek revitalisasi tersebut akan rampung pada Juli 2022.

"Kita mulai Desember 2021, diperkirakan Juli 2022 sudah selesai," jelasnya. ● yan



**PERINGKAT KEMACETAN JAKARTA MENURUN** Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/2). Berdasarkan data yang dirilis lembaga pemeringkat kemacetan kota dunia Tomtom International BV mengatakan indeks kemacetan 2021 menempatkan Jakarta pada peringkat 46 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menempati peringkat 31.

## Pemkot Jakbar Siap Revitalisasi Pasar Gloria Jadi Kios Pecinaan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) merevitalisasi Pasar Gloria, Kecamatan Taman Sari dari kondisi kumuh menjadi kios bergaya pecinaan guna menarik pengunjung, khususnya para penumpang MRT Jakarta di kawasan Kota Tua. Saat ini, pembangunan fase 2B MRT Jakarta dari Harmoni menuju Kota sedang berlangsung.

"Karena sejak dahulu belum terjamah, kita akan perbaiki dengan konsep oriental, selaras dengan China Town," kata Camat Taman Sari, Agus Sulaeman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/2).

Agus mengatakan, revitalisasi tersebut dilakukan lantaran kondisi pasar sebelumnya cukup kumuh, sempit, dan tidak layak. Padahal, pasar tersebut terbelang ramai dikunjungi warga karena banyak rumah makan yang menyajikan masakan khas Tiongkok.

Selain itu, revitalisasi tempat ini juga selaras dengan program pembangunan stasiun MRT Jakarta di kawasan Kota Tua. Dengan

diperbaikinya Pasar Gloria, diharapkan para penumpang MRT yang turun di kawasan Kota Tua bisa berkunjung ke pasar itu. "Setelah pasar terbentuk supaya lebih tertata dengan baik dan pengunjung lebih banyak," kata Agus.

Dia menjelaskan, revitalisasi tersebut akan terus berlangsung selama satu bulan ke depan. Agus juga memastikan proses revitalisasi ini tidak akan memakan anggaran APBD," kata Agus tanpa bersedia merinci nilai anggaran revitalisasi itu dan hanya menyebut sumbernya dari dana tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Sosro.

Setelah Pasar Gloria, Agus mengaku, jajarannya bakal melakukan pembenahan lagi di beberapa titik salah satunya pasar di kawasan Petak Sembilan, Kecamatan Taman Sari. Dengan upaya tersebut, ia berharap, para pedagang bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan sehingga pengunjung pun banyak berdatangan. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KPU

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin (kanan) menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Sebanyak 14 calon anggota KPU periode 2022-2027 ambil bagian dalam tes tersebut dengan memaparkan visi-misi mereka.

## ORANG KAYA DIMINTA ISOLASI MANDIRI DI HOTEL

# Isoter di DKI Diperuntukkan bagi Masyarakat Menengah ke Bawah

Masyarakat yang mampu membayar, diharapkan membiayai isolasi mandiri di hotel atau tempat lain. Pasalnya, lokasi isoter yang dikelola Pemprov DKI mencakup dukungan pasokan makanan dari dana APBD yang dikelola dinas, adalah bantuan dokter Dinas Kesehatan, bantuan Dinsos, BPBD hingga Satpol PP.

yang dikelola Pemprov DKI mencakup dukungan pasokan makanan dari dana APBD yang dikelola dinas, selain dari bantuan dokter Dinas Kesehatan, juga bantuan Dinsos, BPBD hingga Satpol PP.

"Jadi mereka (masyarakat mampu) tidak mengganggu porsi untuk orang-orang kecil," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan lokasi isolasi terkendali (Isoter) di DKI Jakarta. Namun demikian, dia tak memerinci jumlah dan lokasi serta kapasitasnya.

"Sudah kami sampaikan, kami siapkan ada beberapa penambahan," kata Riza ketika ditemui di Balai Kota DKI, Selasa (15/2).

Dia mengatakan, penambahan-penambahan itu akan

mencakup lokasi-lokasi rumah susun, Gedung Olahraga (GOR) hingga Pusdiklat. Cara itu, kata dia, sesuai dengan arahan dari Menteri PANRB, Tjahjoe Kumolo, untuk meny-

iapkan gedung milik pemerintah bagi isolasi masyarakat.

"Tapi kita berharap tempat yang disiapkan tidak digunakan, mudah-mudahan kasusnya menurun," tutur dia. ● yan

## DORONG EKRAF DI KOTA BEKASI

# Gedung Kreatif Center Segera Difungsikan

BEKASI (IM) - Gedung Kreatif Center di kawasan Lapangan Multiguna Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, segera difungsikan untuk kegiatan ekonomi kreatif di kawasan tersebut setelah selesai dibangun.

Ketua Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kota Bekasi, Deni Ardini mengatakan, pemanfaatan gedung itu telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Kemarin kami sudah bertemu Pak Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Beliau sepakat untuk segera mengaktifkan Gedung Kreatif Center," katanya di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selasa (15/2).

Deni beserta jajaran kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif Kota Bekasi yang termaksud dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bekasi Nomor 500/Kep.529-EK/X/2021 mengaku akan segera memanfaatkan gedung tersebut untuk masyarakat Bekasi. "Kami akan gunakan kebermanfaatannya seluas-luasnya untuk masyarakat Bekasi, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kota ini," ujar Deni.

Dia mengajak pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota

Bekasi untuk berkolaborasi dan mengaktifkan kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kreatif melalui Gedung Kreatif Center. "Saya mengundang kawan-kawan pelaku kreatif di kawasan tersebut setelah selesai dibangun."

Sekretaris KNPI Kota Bekasi itu menjelaskan, Gedung Kreatif Center Kota Bekasi dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Gedung milik Pemkot Bekasi tersebut dibangun menggunakan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam program ekonomi kreatif yang digalangan oleh Gubernur M Ridwan Kamil. Letaknya di area lapangan Multiguna atau persis sebelah utara Gedung Pemuda atau KNPI.

Gedung itu dilengkapi dengan sembilan kelas yang bisa dibuat untuk pelatihan dan inkubasi pelaku ekonomi kreatif. "Ada auditorium seperti bioskop yang bisa digunakan untuk ruang pertunjukan seni dan musik, serta masih banyak lagi fasilitas lainnya," kata Deni. ● yan

## Pemprov DKI Tindak Tegas Perkantoran yang Langgar Aturan PPKM Level 3

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menekankan, Pemprov DKI bakal memberi sanksi tegas terhadap perkantoran yang melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3.

Seperti diketahui, dalam aturan PPKM Level 3, untuk perkantoran non-esensial diwajibkan menerapkan sistem WFH 75 persen.

Dipastikan Ariza, jajaran Pemprov DKI dibantu unsur terkait lainnya, selalu melakukan inspeksi mendadak (Sidak)

maupun pengawasan di perkantoran.

"Kalau sidak itu selalu, setiap hari kita sidak. Petugas kita apakah dari Satpol PP, TNI Polri, itu setiap hari melakukan pengawasan, monitoring dan juga Sidak dan penindakan," tegas Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/2).

Politisi partai Gerindra itu meminta masyarakat segera melaporkan bila mendapati perkantoran atau jenis kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan.

"Sekali lagi kalau warga melihat ada tempat-tempat

atau kegiatan yang melanggar prokes laporkan, akan kami tindak," pungkas Ariza.

Sementara berdasarkan data dari Satpol PP DKI Jakarta yang diterima, ada 487 perkantoran yang telah dilakukan pengawasan selama PPKM Level 3 terhitung sejak tanggal 7 - 14 Januari 2022.

Dari total perkantoran yang diawasi, didapati 44 perkantoran yang melakukan pelanggaran dengan rincian 39 diberikan teguran tertulis dan 5 lainnya diberi sanksi penutupan sementara selama 3X24 jam. ● yan

## Pemprov DKI Jamin Ketercukupan Pangan Jelang Bulan Ramadhan

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan, Pemprov akan menjamin ketercukupan stok pangan jelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022.

Hal itu karena diprediksi permintaan pangan meningkat. Walaupun, menurut dia, kenaikan permintaan itu bisa dirasakan pada bulan tertentu khusus kebutuhan pangan strategis.

"Pemprov DKI bersama BUMD dan kementerian akan berupaya menjamin ketercukupan ketersediaan pangannya," kata Suharini kepada awak media, Selasa (15/2).

Dia mengatakan, kenaikan kebutuhan pangan menjelang

Ramadhan dan Idul Fitri memang jauh perbandingannya dibanding bulan biasa. Terlebih, saat bahan pangan yang dimaksud secara khusus paling banyak dicari. "Kenaikan kebutuhan pangan perbulan adalah sebagai berikut, Maret secara signifikan terjadi kenaikan pada komoditas telur ayam dan daging," tuturnya.

Sedangkan April, kata dia, kenaikan terjadi pada seluruh kebutuhan pangan strategis, mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, telur ayam, daging sapi, daging ayam, gula pasir hingga minyak goreng. Mei, kenaikan terjadi pada daging sapi dan daging ayam.

"Untuk penyediaan pangan menjelang perayaan HBKN tersebut, Pemprov

DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD Pangan serta kerja sama dengan stake holder lainnya," kata dia.

Suharini menambahkan, kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain adalah pendistribusian pangan bersubsidi, khususnya beras, daging sapi, daging ayam, susu, ikan dan telur ayam. Sementara untuk masyarakat tertentu, antara lain siswa penerima KJP, penghuni Rusun terdaftar, PJLP terdaftar, adalah gelar pangan bazaar pangan keliling menggunakan mobile food truck yang dimiliki oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Darma Jaya.

"Termasuk optimalisasi pembukaan gerai pangan yang dikelola Perumda Pasar Jaya," kata dia. ● yan



**FINAL 50 METER RIFLE 3 POSITIONS WOMEN GRAND PRIX** Petembak Indonesia Diaz Kusumawardani (kanan) berdampingan dengan petembak Singapura Martina Lindsay Veloso mengikuti Final 50 meter Rifle 3 Positions Women dalam ajang ISSF Grand Prix Rifle/Pistol di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Petembak Singapura Martina Lindsay Veloso berhasil meraih medali emas disusul petembak Indonesia Diaz Kusumawardani meraih medali perak dan medali perunggu diraih oleh petembak Thailand Suparmas Wankaew.

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan hasil keputusan RUPS PT. INDAI VENVRO (untuk selanjutnya disebut perseroan) tertanggal 09 Februari 2022, telah diputuskan untuk menurunkan modal dasar dan disetor Perseroan, yang semula Rp. 673.300.000.000, terbagi atas 673.300 saham menjadi sebesar Rp. 490.000.000 yang terbagi atas 490.000 saham. Dengan demikian komposisi pemegang saham setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, maka menjadi sebagai berikut:

1. Tuan INDRABOEDUONO, sebanyak 120.000 (seratus dua puluh) saham dalam Perseroan.
2. Tuan ADI HARYONO, sebanyak 60.000 (enam puluh) saham dalam Perseroan.
3. Nyonya VENVY HARYANTI, sebanyak 60.000 (enam puluh) saham dalam Perseroan.
4. Tuan ROBIN SETYONO, sebanyak 60.000 (enam puluh) saham dalam Perseroan.
5. PT INDAI JUVER, sebanyak 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan.

Segala keberatan atas penurunan modal perseroan harus diajukan secara tertulis disertai alasannya kepada kantor perseroan dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari dan tanggal pengumuman ini.

Direktur  
Tn. ADI HARYONO